

## IMPLEMENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NO. 54 TENTANG SYARIAH CARD (Studi Produk Hasanah Card di BSI KCP Bogor Pajajaran Bantarjati)

Vina Nurhalizah<sup>1</sup>, Ahmad Muti<sup>2</sup>, Ryan Bianda<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>STIS Al Wafa Bogor

Email: [vinanhz17@gmail.com](mailto:vinanhz17@gmail.com)

### Abstrak

Meningkatnya kebutuhan layanan keuangan syariah mendorong Bank Syariah Indonesia untuk menghadirkan Hasanah Card yang wajib beroperasi sesuai ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 54 tentang Syariah Card. Penelitian ini bertujuan menilai implementasi fatwa tersebut dalam praktik operasional produk Hasanah Card di BSI KCP Bogor Pajajaran Bantarjati serta mengidentifikasi tingkat pemahaman pegawai terhadap prinsip-prinsip syariah yang melandasinya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan fatwa pada Hasanah Card umumnya telah sesuai prinsip syariah, terutama terkait struktur multiakad dan penerapan mekanisme ta'widh, namun masih ditemukan variasi pemahaman pegawai mengenai beberapa aspek teknis fatwa. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan syariah telah berjalan cukup baik, tetapi efektivitas implementasi di tingkat operasional memerlukan penguatan melalui peningkatan edukasi dan pelatihan pegawai agar kualitas layanan dan kepatuhan syariah produk dapat semakin optimal.

**Kata Kunci:** Hasanah Card, Fatwa DSN-MUI No. 54, Implementasi Fatwa, Syariah Card, Bank Syariah Indonesia.

### Abstract

*The increasing demand for sharia financial services has prompted Bank Syariah Indonesia to introduce the Hasanah Card, which must operate in accordance with the provisions of the DSN-MUI Fatwa No. 54 concerning Sharia Cards. This study aims to assess the implementation of the fatwa in the operational practices of the Hasanah Card product at BSI KCP Bogor Pajajaran Bantarjati and to identify the level of employee understanding of the underlying sharia principles. The study used a qualitative method with a descriptive approach, through in-depth interviews, observation, and documentation. The results show that the implementation of the fatwa provisions on the Hasanah Card is generally in accordance with sharia principles, especially regarding the multi-agreement structure and the application of the ta'widh mechanism. However, there are still variations in employee understanding regarding several technical aspects of the fatwa. These findings indicate that sharia compliance has been running quite well, but the effectiveness of implementation at the operational level requires strengthening through increased employee education and training to optimize service quality and product sharia compliance.*

*Keywords: Hasanah Card, DSN-MUI Fatwa No. 54, Fatwa Implementation, Syariah Card, Bank Syariah Indonesia.*

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan transaksi digital dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang praktis telah mendorong bank syariah untuk mengembangkan produk pembiayaan yang aman, efisien, dan sesuai prinsip syariah (Aini, 2020). Salah satunya adalah Syariah Card, yang berfungsi sebagai alat pembayaran layaknya kartu kredit namun menggunakan skema syariah melalui akad kafalah, qardh, dan ijarah (Putra et al., 2023). Landasan operasional Syariah Card di Indonesia diatur melalui Fatwa DSN-MUI No. 54 Tahun 2006, yang mengatur ketentuan umum, batasan transaksi, fee, ta'widh, serta prosedur penggunaan kartu. Bank Syariah Indonesia kemudian menghadirkan BSI Hasanah Card sebagai bentuk implementasi fatwa tersebut (Rifa'I, 2018). Di Indonesia, konsep penggunaan Syariah Card pertama kali muncul pada tahun 2003, ketika terjadi forum free session di Bank Indonesia pada tanggal 30 Januari 2003. Penggunaan Syariah Card sejak saat itu menjadi kontroversi dan berlanjut hingga saat ini. Perdebatan Panjang ini terjadi baik secara teoritis maupun praktis. Banyak sekali pandangan teoritis yang menyatakan bahwa kartu kreditsyariah lebih mendekatkan diri kepada sifat israf (berlebih-lebihan), sehingga menjadikan umat Islam lebih bersikap konsumtif, boros, dan membiasakan untuk berutang meskipun agama tidak melarang hal tersebut. Sebaliknya, jika sifat israf diperselisihkan, maka hal tersebut dapat dikendalikan (Firmanda, 2014). Fatwa ini didasarkan pada prinsip syariah bahwa dasar boleh tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang telah dinyatakan dengan jelas. Dengan demikian kehadiran dan keberadaan Syariah Card dapat diartikan sebagai tidak adanya faktor-faktor yang mencakup aktivitas yang dilarang atau tidak dianjurkan (Kristianti, 2014).

Namun, kajian sebelumnya lebih dominan menyoroti aspek normatif atau perilaku konsumen, sehingga belum banyak penelitian yang secara langsung mengevaluasi bagaimana fatwa ini diterapkan dalam praktik operasional dan sejauh mana pegawai memahami ketentuan syariah dalam produk yang mereka jalankan. Bertolak dari kesenjangan tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penting: (1) bagaimana implementasi Fatwa DSN-MUI No. 54 Tahun 2006 dalam produk Hasanah Card di BSI KCP Bogor Pajajaran Bantarjati? dan (2) sejauh mana pemahaman pegawai terhadap ketentuan fatwa, khususnya terkait akad, fee, batasan transaksi, serta mekanisme ta'widh? Pertanyaan ini penting mengingat kepatuhan

syariah tidak hanya ditentukan oleh turan tertulis, tetapi juga oleh kemampuan pelaksana kebijakan dalam memahami dan menjalankan

Merespons rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis penerapan ketentuan fatwa dalam mekanisme operasional Hasanah Card serta menilai pemahaman pegawai BSI terhadap prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Penelitian ini menggabungkan analisis regulatif dengan pendekatan empiris melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen, sehingga mampu memberikan gambaran substantif mengenai interaksi antara ketentuan fatwa dengan praktik lapangan. Fokus pada implementasi multi akad, struktur fee berbasis ujah, serta mekanisme ta'widh memungkinkan penelitian ini mengevaluasi kesesuaian teknis operasional dengan prinsip syariah secara lebih komprehensif.

Dari sisi kontribusi ilmiah, penelitian ini mengisi kekosongan kajian yang sebelumnya hanya menyoroti aspek normatif atau perilaku pengguna, dengan menawarkan analisis empiris mengenai bagaimana fatwa benar-benar dijalankan oleh lembaga keuangan syariah. Pendekatan ini memberikan nilai tambah bagi studi ekonomi syariah karena menghubungkan fatwa sebagai norma hukum dengan proses implementasi di lapangan, termasuk kemampuan pegawai dalam memahami dan menerapkan prinsip syariah sesuai ketentuan DSN-MUI. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi, regulator, dan praktisi dalam meningkatkan kualitas implementasi produk syariah card, memperkuat literasi pegawai, serta mendukung konsistensi penerapan prinsip syariah dalam produk keuangan modern.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang berfokus pada implementasi Fatwa DSN-MUI No. 54 Tahun 2006 pada produk Hasanah Card di BSI KCP Bogor Pajajaran Bantarjati. Pemilihan pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik operasional dan pemahaman pegawai terhadap prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam fatwa. Objek penelitian adalah BSI KCP Bogor Pajajaran Bantarjati, dengan waktu penelitian selama Februari 2025. Subjek penelitian terdiri dari 10 informan, mencakup 8 pegawai tetap BSI yang menggunakan Hasanah Card serta 2 pengguna non-pegawai, dengan pertimbangan bahwa kelompok ini terlibat langsung dalam penggunaan maupun pengelolaan produk.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk menggali pemahaman informan mengenai akad, fee, batasan syariah, dan implementasi procedural (Kamilia, 2022). Observasi dilakukan dengan mengikuti proses pengajuan pembiayaan Hasanah Card secara langsung, guna memperoleh gambaran nyata mengenai alur operasional dan interaksi antara pegawai dan nasabah (Saleh, 2017). Dokumentasi meliputi penelaahan dokumen resmi bank, arsip permohonan pembiayaan, serta data administratif yang relevan (Syarifuddin, 2024).

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, yang diterapkan secara berulang selama proses penelitian. Seluruh data yang terkumpul dibandingkan melalui triangulasi sumber dan teknik untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan (Sugiyono, 2023). Dengan demikian, analisis tidak hanya menggambarkan kesesuaian implementasi produk dengan ketentuan fatwa, tetapi juga mengungkap variasi pemahaman pegawai serta faktor operasional yang memengaruhi pelaksanaannya.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Fatwa DSN-MUI No. 54 Tahun 2006 pada produk Hasanah Card di BSI KCP Bogor Pajajaran Bantarjati telah berjalan cukup kuat pada tataran operasional. Bank menerapkan struktur multiakad (kafalah-qardh-ijarah) sebagai dasar syariah card, di mana bank berperan menjamin transaksi nasabah, menyediakan fasilitas talangan sementara, dan membebaskan ujarah sebagai biaya jasa. Penerapan akad dilakukan melalui penandatanganan perjanjian, penjelasan biaya, serta pemisahan yang tegas antara ujarah dan bunga. Selain itu, sistem bank secara otomatis memblokir transaksi yang melibatkan sektor non-halal sehingga batasan syariah tetap terjaga. Mekanisme ta'widh juga dijalankan sesuai ketentuan fatwa, yakni denda tidak dicatat sebagai pendapatan bank, melainkan dialokasikan ke dana sosial, sehingga menghindari unsur riba dalam bentuk apa pun.

Meskipun implementasi struktural telah berjalan sesuai ketentuan, pemahaman pegawai terhadap detail fatwa menunjukkan tingkat variasi. Pegawai bagian pembiayaan dan pemasaran memiliki pemahaman yang lebih kuat mengenai struktur akad, batasan syariah, serta prinsip ujarah. Di sisi lain, pegawai yang tidak berinteraksi langsung dengan produk menunjukkan pemahaman yang lebih terbatas, terutama terkait mekanisme ta'widh, tujuan

denda sosial, serta perbedaan mendasar antara syariah card dan kartu kredit konvensional. Variasi ini berdampak pada kualitas informasi yang diterima nasabah, terutama mengenai biaya, akad, dan batas penggunaan kartu.

Di sisi nasabah, sebagian memahami bahwa Hasanah Card berbeda dari kartu kredit konvensional karena tidak menerapkan bunga dan menggunakan akad syariah. Namun sebagian lainnya masih menyamakan ujarah dengan bunga, atau memandang Hasanah Card sebagai versi “lebih ringan” dari kartu kredit biasa. Temuan ini mengindikasikan bahwa kepatuhan syariah pada tingkat sistem telah berjalan baik, tetapi pemahaman substantif pengguna belum sepenuhnya berkembang. Ketidakseimbangan ini memperkuat argumen bahwa produk keuangan syariah akan menghadapi tantangan jika aspek edukasi tidak diperkuat.

Jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan, hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan pandangan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh disposition dan kompetensi pelaksana. Implementasi fatwa tidak cukup hanya mengandalkan SOP atau pengawasan formal, tetapi memerlukan internalisasi norma syariah oleh para pegawai yang terlibat langsung dalam produk. Dibandingkan penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas syariah card dari sisi normatif atau fikih, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan mengungkap bagaimana fatwa diterjemahkan ke dalam praktik, bagaimana pegawai memahaminya, serta bagaimana nasabah menafsirkan produk tersebut dalam penggunaan sehari-hari.

Secara akademik, temuan ini bermakna penting karena menunjukkan bahwa efektivitas implementasi fatwa di lembaga keuangan syariah tidak hanya dapat dinilai dari struktur akad yang benar atau kesesuaian prosedur, tetapi juga dari kualitas pemahaman pelaksana dan pengguna. Penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan syariah bersifat multidimensi: struktural, operasional, dan kognitif. Ketika salah satu dimensi tidak sejalan misalnya pemahaman nasabah yang kurang tepat maka efektivitas fatwa sebagai pedoman transaksi berpotensi menurun. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan dasar empiris bagi perbankan syariah untuk memperkuat edukasi produk, pelatihan pegawai, serta transparansi informasi agar nilai-nilai syariah dapat dipahami dan dipraktikkan secara utuh oleh seluruh pihak yang terlibat.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Fatwa DSN-MUI No. 54 Tahun 2006 pada produk Hasanah Card di BSI KCP Bogor Pajajaran Bantarjati telah berjalan cukup baik pada tataran struktural dan operasional. Bank telah menerapkan struktur multiakad (kafalah-qardh-ijarah), menegakkan batasan transaksi yang sesuai syariah, serta mengelola mekanisme ta'widh dan denda sosial secara tepat. Sistem perbankan juga secara konsisten mencegah transaksi di sektor non-halal, sehingga prinsip kehati-hatian syariah terjaga.

Namun demikian, penelitian mengidentifikasi adanya variasi pemahaman di kalangan pegawai, terutama terkait rincian akad, mekanisme ujarah, dan tujuan ta'widh. Pemahaman nasabah pun belum merata, bahkan sebagian masih menyamakan ujarah dengan bunga konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan struktural belum sepenuhnya diikuti oleh pemahaman substantif. Secara akademik, temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi fatwa tidak hanya ditentukan oleh SOP dan regulasi, tetapi juga oleh internalisasi prinsip syariah oleh pelaksana dan pengguna. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris bagi kajian implementasi fatwa dengan menunjukkan hubungan antara pemahaman aktor dan efektivitas kebijakan syariah di tingkat operasional.

### Saran

1. Peningkatan Edukasi Nasabah melalui Komunikasi yang Efektif

Dari sisi komunikasi, BSI perlu meningkatkan strategi komunikasi tentang dasar hukum dan struktur akad Hasanah Card, agar nasabah lebih paham, misalnya melalui media sosial dan aplikasi digital.

2. Pemerataan Pemahaman Internal Pegawai terhadap Fatwa DSN-MUI

Pelatihan internal berkala diperlukan agar semua pegawai memahami struktur akad dan prinsip fatwa secara merata.

3. Penguatan Sumber Daya dan Sistem Birokrasi yang Adaptif

BSI diharapkan menyederhanakan SOP dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi nilai-nilai syariah.

4. Evaluasi Berkala terhadap Implementasi Fatwa

Disarankan agar BSI melakukan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan fatwa agar tetap konsisten dan relevan dengan perkembangan

## DAFTAR PUSTAKA

- Aini, I. (2020). Analisis Perilaku Konsumen Syariah Card. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 6(2), 248–268. <http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudentia/article/view/3413>
- Firmanda, H. (2014). Kartu kredit syariah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 253–288. [article.php](#)
- Kamilia, N. (2022). Analisis Pembiayaan Mikro Bank Aceh Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Di Banda Aceh. 33. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/32730>
- Kristianti, D. S. (2014). Kartu Kredit Syariah Dan Perilaku Konsumtif Masyarakat. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 14(2), 287–296. <https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1287>
- Putra, S. J., Yudesman, Y., & Iska, S. (2023). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Fatwa Dsn-Mui Nomor 54 Tahun 2006. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(3), 532–542. <https://doi.org/10.60126/maras.v1i3.99>
- Rifa'i, A. B. A. (2018). Analisa Kesesuaian Kartu Kredit Syariah Terhadap Fatwa No.54/Dsn-Mui/X/2006 Tentang Syariah Card Pada Produk Ib Hasanah Card Bank Bni Syariah. *AL-INFAQ : Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 67. <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/alinqa/article/view/293>
- Sugiyono, P. D. (2023). Metode Peneliti Studi Kasus (Terbaru). ALFABETA,cv.
- Saleh, S. (2017). Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung. In Analisis Data Kualitatif (Vol. 1). <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/14856>
- Syarifuddin, J. (2024). Respon Masyarakat Terhadap Keberadaan BSI di KCP SUDU KAB. *ENREKANG. Αγαη*, 15(1), 37–48. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8176>